

# PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Wanda Syahputra

NPP. 29.1049

*Asdaf Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: wandadika29@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The high potential for flood disasters in Singkawang City is seen from the occurrence of floods every year. This flood event usually occurs due to the rainy season with high rainfall, unstable drainage and flood shipments from other districts. **Purpose:** The purpose of this study was to obtain an overview of the role of the Regional Disaster Management Agency in mitigating flood disasters in Singkawang City, the inhibiting factors faced and the efforts made by the Singkawang City Regional Disaster Management Agency in overcoming the inhibiting factors in flood disaster mitigation. **Methods:** In this study, the author uses a qualitative approach and uses a descriptive method. The data sources used are primary data sources and secondary data with 9 informants. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing. **Results:** BPBD Singkawang City has played a good role in mitigating flood disasters in Singkawang City. By increasing the capacity of TRC and increasing community capacity through the KELTANA program as well as taking mitigation actions such as making flood-prone maps, preparing disaster risk study documents and others. The inhibiting factors are inadequate human resources, streamlining of the Singkawang City BPBD organizational structure bureaucracy, and inadequate facilities and infrastructure. **Conclusion:** BPBD Singkawang City has carried out its role well in mitigating flood disasters in Singkawang City. This is evidenced by the good response from people living in flood-prone areas. The Singkawang City BPBD has also made efforts to overcome the inhibiting factors, namely by increasing human resources, carrying out flood disaster preparedness in Singkawang City, and conducting horizontal coordination on a regular basis.

**Keywords:** Flood, Role of Regional Disaster Management Agency, Flood Disaster Mitigation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tingginya potensi bencana banjir di Kota Singkawang dilihat dari terjadinya bencana banjir setiap tahunnya. Kejadian banjir ini biasanya terjadi dikarenakan musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, drainase yang tidak stabil dan banjir kiriman dari Kabupaten lain. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang, faktor penghambat yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang dalam mengatasi faktor penghambat dalam mitigasi bencana banjir. **Metode:**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan informan 9 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** BPBD Kota Singkawang sudah berperan dengan baik dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang. Dengan melakukan peningkatan kapasitas TRC dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui program KELTANA serta melakukan tindakan mitigasi seperti membuat peta rawan bencana banjir, penyusunan dokumen kajian risiko bencana dan lain-lain. Adapun faktor yang menghambat, yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai, perampangan birokrasi struktur organisasi BPBD Kota Singkawang, dan sarana dan prasarana yang masih kurang. **Kesimpulan:** BPBD Kota Singkawang sudah melaksanakan perannya dengan baik dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang. Hal ini dibuktikan dengan respon baik dari masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir. BPBD Kota Singkawang juga sudah melakukan upaya untuk mengatasi faktor yang menghambat yaitu dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia, melakukan kesiagaan bencana banjir di Kota Singkawang, dan melakukan koordinasi horizontal secara berkala.

**Kata kunci:** Banjir, Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Mitigasi Bencana Banjir

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia tergolong ke dalam salah satu negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi akan terjadinya bencana yang bersifat alami maupun yang berasal dari perbuatan manusia atau non-alami, maka pemerintah membuat kebijakan terkait kebencanaan yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kegunaan utama dari peraturan tersebut adalah sebagai batasan yang mendasari pengaturan terkait permasalahan bencana yang terjadi di Indonesia, dimulai dari pencegahan, kepengurusan, hingga penanggulangan. Didalamnya juga diatur terkait pengelolaan sebelum terjadi (pra-bencana), sesaat setelah bencana berlangsung (tanggap darurat), dan masa rehabilitasi rekonstruksi (pasca-bencana).

Berkaitan dengan itu, pemerintah Indonesia membentuk badan yang mengelola dan melaksanakan tugas terkait kebencanaan yaitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai lembaga pusat yang menggerakkan sistem tersebut. BNPB bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, berdasarkan prinsip otonomi daerah melalui desentralisasi dan tugas pembantuan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang tujuan dan tindakannya meliputi menyusun prosedur dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana di daerah secara cepat, tepat, efektif, dan efisien. Selain itu, sebagai perantara pemerintah dalam pelayanan penanggulangan bencana, BPBD berkontribusi dalam perlindungan kependudukan. Sesuai dengan tujuan konstitusional paragraf sebelumnya, pemerintah dituntut untuk memenuhi tugas penanggulangan bencananya semaksimal mungkin.

Kejadian banjir di Indonesia membuat banyaknya kejadian yang menyebabkan kerusakan material, pengungsian dan dapat menyebabkan hilangnya nyawa. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memantau bencana hidrometeorologi, seperti banjir, yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada bulan Februari 2021. Beberapa wilayah terdampak banjir akibat hujan deras, antara lain Kota Semarang, Kabupaten Lombok Timur, Dompu dan Bima di Nusa Tenggara Barat

(NTB), Jember di Jawa Timur, dan Singkawang di Kalimantan Barat. Beberapa wilayah yang terdampak banjir rata-rata penyebab utamanya adalah curah hujan yang tinggi.

Hujan merupakan faktor utama penyebab banjir di Kota Singkawang. Perubahan iklim telah menyebabkan perubahan pola curah hujan, dengan periode curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Ada hal lain yang dapat menyebabkan banjir di Kota Singkawang seperti drainase yang kurang stabil akibat tertutupnya sampah dan banjir kiriman dari kabupaten lain. Karena situasi ini, saluran yang ada tidak lagi dapat menampung sejumlah besar air yang disebabkan hujan dan tanah dengan cepat menjadi jenuh. Sebagai kota dengan curah hujan yang tinggi, potensi bencana banjir di Kota Singkawang juga menjadi semakin besar. Seperti pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, bencana banjir di Kota Singkawang sudah menjadi bencana tahunan yang selalu terjadi setiap tahunnya sehingga di setiap tahunnya puluhan bahkan ratusan masyarakat yang berada di wilayah rawan banjir terpaksa harus mengungsi ke tempat evakuasi yang telah disediakan oleh pemerintah.

Kenyataan menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan bencana oleh sebagian masyarakat dirasakan belum merupakan satu kebutuhan atau hal yang prioritas dan mendesak (basic needs) karena belum menyadari bahwa bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan dapat menimpa siapa saja. Kurangnya pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab akan pentingnya upaya pencegahan dan penanggulangan bencana, akan berakibat jatuhnya korban dan kerugian material apabila terjadi bencana.

Upaya pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Singkawang harus melakukan perannya dengan sebaik mungkin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan penanggulangan bencana terutama mitigasi bencana terlaksana dengan baik. Namun dalam pelaksanaannya terkadang masih belum sempurna, karena adanya hambatan yang terjadi dilapangan dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait bagaimana cara agar dapat mengantisipasi bencana banjir dan mengurangi dampak dari bencana tersebut. Karena keberhasilan mitigasi bencana banjir memerlukan peran serta semua pihak, mulai dari pemerintah hingga peran serta dari masyarakat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah**

Bencana yang selalu terjadi di Indonesia dengan peringkat keenam di dunia adalah banjir. Bencana banjir memang selalu menjadi bencana yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Menurut analisis dari Aqeduct Global Flood Analyzer, Indonesia merupakan negara keenam yang paling terdampak banjir di dunia. Dengan melihat analisis diatas, sudah membuktikan bahwa Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dalam kasus bencana banjir. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana yang sering terjadi di Indonesia dengan 464 kasus per tahun adalah bencana banjir. Banyaknya kasus banjir di Indonesia pastinya merugikan masyarakat setempat yang tinggal di wilayah rawan banjir. Diperlukan penanganan khusus untuk menangani masalah ini, melalui penanggulangan bencana yang meliputi, pra bencana (sebelum terjadi bencana kemudian tanggap darurat (ketika terjadi bencana) dan pasca bencana (setelah terjadi bencana).

Hidup di wilayah dengan curah hujan yang tinggi, yang rentan terhadap bencana alam, harus mempunyai rasa kewaspadaan yang tinggi. Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana alam. Oleh karena itu, mitigasi harus dipandang sebagai upaya dan kegiatan untuk mengurangi dan meminimalkan bencana yang perlu disosialisasikan secara cepat dan tepat. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, prinsip kebencanaan perlu diterapkan secara cepat dan tepat, pengutamakan, koordinasi dan keterpaduan, efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, hubungan kerjasama, pemberdayaan, dan non-diskriminatif.

Kota Singkawang sering terjadi bencana banjir yang menyebabkan masyarakat dengan rasa terpaksa harus mengungsi setiap tahunnya. Karena air yang masuk kedalam rumah warga dengan kedalaman airnya hingga 1 meter bahkan ada yang lebih. Oleh karena itu masyarakat harus selalu waspada apabila terjadi banjir lagi. Karena apabila tidak terkontrol dan adanya kelalaian, maka bisa jadi akan ada korban jiwa. Seperti kasus pada tahun 2011 yang lalu ada seorang anak kelas 2 SD meninggal dunia diakibatkan oleh banjir di Setapak Besar Kecamatan Singkawang Utara. Akibat kelalaian itu, seorang anak terbawa arus air sungai yang sangat deras akibat meluapnya air karena curah hujan yang tinggi. Mitigasi adalah salah satu cara untuk mengurangi dan memperkecil potensi serta dampak dari bencana banjir di Kota Singkawang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Singkawang memiliki tugas menyelenggarakan fungsinya seperti perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinir dan terpadu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana banjir. Penelitian oleh Sugipto Beong, Erwin Resmawan, dan Rita Kalinggi yang berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kota Samarinda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan bencana alam di Samarinda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda lebih cenderung mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana, serta memastikan koordinasi dengan instansi lain, saling memantau daerah rawan bencana, dan mengembangkan Program Pemberdayaan Bencana. Sekolah Aman Bencana (SAB) dan Desa Tanggap Bencana (DESTANA) dimaksudkan untuk memitigasi dampak bencana dan menyampaikan informasi bencana. BPBD Kota Samarinda memasang poster/bahasa isyarat di Jalan Kota Samarinda, melakukan sosialisasi tingkat desa, dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan warga, bekerjasama dengan berbagai kalangan, antara lain Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan POLRI, serta anggota SKPD Pemerintah Kota Samarinda seperti Dinas Sosial, PUPR, BMKG, BLH, Bapeda, dan Dinas Kesehatan dan dinas yang terkait dengan kebencanaan, namun beberapa implementasi tersebut masih kurang pengendalian dan implementasinya. dalam program Desa Tahan Bencana (DESTANA) dan Sekolah Aman Bencana (SAB) sehingga tidak ada angka mitigasi bencana di kota Samarinda. Penelitian Henrika Riantika mengkaji peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di Desa Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Teknik yang digunakan adalah kualitatif (menjelaskan secara ilmiah keadaan sesuatu). Seperti yang ditunjukkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Enrekang yang menerapkan prinsip-prinsip kebencanaan yang baik selama bencana banjir di Desa Lewaja Kabupaten Enrekang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tampil apik saat bencana banjir di Desa Lewaja Kabupaten Enrekang. manajemen, yaitu apakah penanggulangan bencana dilakukan secara tepat waktu dan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai upaya penanggulangan bencana, keberadaan keadaan yang baik dengan organisasi atau lembaga penting bergantung pada kondisi yang bagus, dan penanggulangan bencana yang kooperatif dan bantuan menyatukan berbagai pemangku kepentingan secara seimbang. Penelitian Lorencia P. Barus menggali peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan banjir di Medan. BPBD Kota Medan didirikan pada tahun 2012 dan masih merupakan komponen yang relatif muda dari sistem pemerintahan Kota Medan.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan wawancara mendalam dan teknik analitik kualitatif. Namun, BPBD Kota Medan memang memiliki peta rawan bencana khusus kota yang disusun, diresmikan, dan ditunjukkan kepada penduduknya secara utuh dan jelas untuk keperluan perkiraan bencana dan evakuasi.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Singkawang, selain itu cara penanganan penanggulangan bencana yang dilakukan pada penelitian ini adalah pada tahap pra bencana yaitu tahap mitigasi bencana. Pada teori peran yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan teori peran dari Siagian (2012: 142-150) yang menyatakan bahwa peran ialah upaya yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern kemudian ada lima peran dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan sendiri.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis gambaran mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang, untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang menjadi faktor penghambat mitigasi bencana di Kota Singkawang dan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengatasi faktor penghambat dalam mitigasi bencana di Kota Singkawang.

### **II. METODE**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode deskriptif. Konsep dasar kualitatif ini lebih menekankan bahwa unsur terpentingnya adalah sifat yang dimiliki oleh data yang diperoleh yaitu data ilmiah yang disajikan dalam bentuk penjelasan dan uraian dengan bentuk informasi atas penelitian tersebut. Metode kualitatif menurut Jhon W.Creswell (2013:4) yaitu adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari beberapa individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Penulis mengumpulkan data melalui, wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang, Kepala Sekretariat BPBD Kota Singkawang, kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Singkawang, dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir 6 orang). Adapun analisisnya menggunakan teknis analisis data model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009:246) yang menyatakan bahwa teknik analisis data terbagi menjadi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang menggunakan pendapat dari Siagian yang menyatakan bahwa peran pemerintah terjadi pada lima tahap, yaitu peran sebagai stabilisator, peran sebagai inovator, peran sebagai

modernisator, peran sebagai pelopor dan peran sebagai pelaksana sendiri. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Peran Sebagai Stabilisator**

Peran BPBD Kota Singkawang Selaku Stabilisator yaitu menjaga stabilitas masyarakat agar tetap stabil dengan memberikan situasi yang kondusif yaitu rasa aman dan tenang sehingga aktifitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang telah direncanakan melalui program, kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa kendala. BPBD Kota Singkawang sebagai organisasi pemerintah memiliki tugas memberikan rasa aman terhadap bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba, untuk memberikan rasa aman tersebut kebijakan yang dilakukan BPBD adalah peningkatan kapasitas berbasis masyarakat. Peningkatan kapasitas berbasis masyarakat yaitu pemberian edukasi kepada masyarakat sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap bencana banjir. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan banjir terutama pada musim penghujan tiba dan memberikan peringatan dini jika terjadi hujan deras, peringatan dini bertujuan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana banjir. Dalam hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Singkawang mengatakan bahwa “dalam menjaga stabilitas masyarakat yang aman dan tenang dari bencana kami melakukan kegiatan prabencana yaitu mitigasi bencana banjir mulai dari memberikan himbuan potensi akan terjadinya bencana berdasarkan analisis perkiraan cuaca dari BMKG yang disampaikan melalui camat dan lurah terkait, kemudian kami melakukan sosialisasi berupa pelatihan relawan peduli bencana, menyebarkan informasi mengenai bencana banjir melalui siaran radio, pemasangan spanduk, baliho dan banner dan pembagian pamflet kepada masyarakat di daerah rentan banjir di Kota Singkawang, pemasangan rambu bahaya bencana di beberapa titik berdasarkan mapping area rawan bencana yang di buat oleh BPBD Kota Singkawang dan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang di fasilitasi oleh BNPB yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Singkawang melalui BPBD agar dampak yang ditimbulkan tidak besar dan pelaksanaan ini kami lakukan secara rutin agar masyarakat” berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Singkawang telah melaksanakan perannya sebagai stabilisator yaitu memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan melakukan mitigasi bencana banjir agar dampak yang ditimbulkan tidak besar.

### **3.2. Peran Sebagai Inovator**

Peran sebagai Inovator yaitu peran BPBD Kota Singkawang sebagai organisasi pemerintah yang menciptakan ide baru menjadi sebuah kebijakan atau menciptakan sebuah mekanisme baru untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi waktu, tetapi inovasi juga bisa berarti membangun sesuatu yang baru dan memperbaiki solusi yang sudah ada. Salah satu aspek yang membutuhkan inovasi yaitu standar operasional prosedur dimana selalu membutuhkan pembaharuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Standar operasional prosedur merupakan suatu mekanisme kerjasama terstruktur memuat Langkah-langkah yang akan diambil Ketika terjadi bencana, mekanisme tersebut disusun dan disepakati bersama oleh semua insitusi pelaksana dan mengatur tugas, kewenangan, koordinasi antar insititusi tersebut. Dalam penangulangan bencana yang membutuhkan waktu yang singkat seperti bencana banjir di Kota Singkawang, inovasi sangat diperlukan terutama inovasi sistem operasional kerja untuk

mempersingkat jalur koordinasi dan mempercepat penanganan agar dampak bencana yang ditimbulkan ke masyarakat dapat diminimalisir.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Singkawang yaitu “Dalam metode kerja BPBD Kota Singkawang ini dari segi inovasi kerja khususnya Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan kami memiliki inovasi program yang baru berjalan beberapa tahun ini yaitu peningkatan kapasitas TRC atau Tim Reaksi Cepat yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tim BPBD dalam penanggulangan bencana agar dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Kemudian untuk peningkatan kapasitas masyarakatnya dalam mitigasi bencana banjir yaitu KELTANA atau Kelurahan Tangguh Bencana dan KATANA yaitu Keluarga Tangguh Bencana yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat menghadapi bencana banjir di tingkat Kelurahan dan Keluarga.” Penuturan diatas menjelaskan program Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memiliki inovasi yaitu mitigasi bencana melalui peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) dan KATANA yaitu Keluarga Tahan Bencana, KELTANA dan KATANA sendiri yaitu program pemerintah berupa fasilitasi dan pendampingan kepada masyarakat ditingkat kelurahan dan keluarga untuk Menyusun dokumen penanggulangan bencana banjir, Serta pelatihan dan fasilitasi masyarakat untuk berkoordinasi kepada instansi terkait dalam rangka pembangunan wilayah kelurahan yang mengikuti dokumen hasil studi penanggulangan bencana agar meminimalisir daerah rawan bencana di lingkungan kelurahan dan keluarga. Kemudian dipertegas dengan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang yaitu “Kami untuk inovasi dalam mitigasi bencana telah melakukan peningkatan kapasitas masyarakat yaitu dengan membuat program KELTANA dan KATANA. Program ini bertujuan agar masyarakat mengetahui dan sadar akan resiko bencana di lingkungannya, kemudian dalam pengetahuannya agar mengetahui dan memperkuat struktur bangunan paham manajemen bencana, edukasi bencana dan mampu menyelamatkan diri sendiri keluarga dan tetangga.” Berdasarkan hasil wawancara tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang mengungkapkan jika inovasi yang sedang disusun yaitu KELTANA dan KATANA yang bertujuan agar masyarakat mengetahui resiko bencana yang ada di lingkungannya kemudian untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar paham dalam manajemen bencana dan dapat mampu menyelamatkan diri sendiri keluarga dan tetangganya.

Penyusunan SOP penanganan banjir di Kota Singkawang sangat berperan krusial dikarenakan kebencanaan sendiri merupakan tugas utama BPBD. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat BPBD Kota Singkawang yaitu “Dalam penyusunan SOP penanganan banjir BPBD yang berperan krusial karena kebencanaan sendiri merupakan tugas utama BPBD, penyusunan SOP kita lakukan bersama instansi terkait dan mengikut sertakan masyarakat, dari SOP inilah kemudian kita dapat berlanjut ke program lainnya seperti Mitigasi bencana dan pembuatan analisis resiko bencana” berdasarkan pernyataan diatas dapat di simpulkan BPBD merupakan instansi yang aktif dalam penyusunan SOP penanggulangan bencana banjir karena BPBD merupakan instansi terdepan dalam penanggulangan bencana. Standar operasional prosedur bertujuan mengharmonisasi kewenangan antar instansi dan keikutsertaan masyarakat dalam penangulangan resiko bencana sehingga tercapai efisiensi, efektifitas dan peningkatan kinerja pemerintah Kota Singkawang. Lebih lanjut wawancara dengan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang yaitu “Untuk SOP ini kami masih belum ada pembaharuan, kami masih mengikuti SOP yang lama karena keadaan sekarang ini masih belum membutuhkan suatu pembaharuan namun kami sangat terbuka jika ada inovasi yang baru karena tujuan kami semua proses baik administrasi dan tindakan di lapangan dapat di lakukan dengan cepat, tepat dan inovasi itu jangan sampai menyalahi peraturan yang ada” hasil wawancara tersebut menyimpulkan BPBD Kota Singkawang telah memiliki SOP yang masih berlaku dan sesuai dengan

keadaan masyarakat sehingga belum membutuhkan suatu pembaharuan yang signifikan. Dari pernyataan tersebut juga menyimpulkan bahwa BPBD Kota Singkawang terbuka dengan perubahan mengikuti kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan atau menyalahi peraturan perundang-undangan. Seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang daerahnya sering terkena dampak banjir yaitu “Untuk SOP sendiri saya belum tahu dengan jelas, tetapi apabila terjadi bencana di tempat tinggal kami, BPBD Kota Singkawang bisa dibilang cukup cepatlah karena mereka langsung datang ke lokasi terjadi bencana dan langsung mengevakuasi warga” berdasarkan wawancara tersebut tujuan disusunnya SOP telah tercapai, sasaran utama SOP tersebut adalah tindakan yang dilakukan BPBD dapat diterima langsung oleh masyarakat dimana BPBD bertindak cepat menanggulangi bencana banjir dengan hadir melakukan evakuasi terhadap masyarakat terdampak banjir.

### **3.3. Peran Sebagai Modernisator**

Sebagai organisasi pemerintah BPBD Kota Singkawang harus mampu berubah menjadi lebih baik dengan kebutuhan masyarakat baik melalui transformasi struktur organisasi, peningkatan kompetensi penguasaan ilmu pengetahuan kebencanaan, maupun perubahan paradigma di masyarakat tentang penanggulangan bencana banjir. Perubahan paradigma masyarakat yang sebelumnya menitikberatkan pada penanganan respons bencana bertransformasi menjadi kesiapsiagaan.

Peran BPBD Kota Singkawang sebagai modernisator merupakan bagian wujud pemerintah yang dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang kini semakin modern, dimana pemerintah dan masyarakat tidak memiliki pilihan selain mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan perubahan kondisi sosiologi-budaya masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang “peningkatan kapasitas pegawai adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kami karena jangan sampai kurangnya kompetensi menjadikan pelayanan kita tidak maksimal terutama saat tanggap darurat, jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan pertolongan yang maksimal karena kekurangan kompetensi oleh anggota BPBD sendiri, hal tersebut merupakan bentuk kelainan yang harus kami hindari dengan demikian untuk meningkatkan kompetensi kita wajibkan pegawai BPBD mengikuti pelatihan kebencanaan dan praktik yang dilatih oleh ahli dibidangnya” berdasarkan hasil wawancara tersebut BPBD Kota Singkawang menyadari bahwa peningkatan kapasitas pegawai sangat di perlukan terutama pada saat tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Dengan demikian untuk meningkatkan kapasitas pegawainya BPBD Kota Singkawang bekerjasama dengan BPBD Provinsi Kalimantan Barat, BNPB, POLRI dan TNI. Kerjasama dengan instansi-instansi tersebut dikarenakan kompetensi yang belum memadai dari BPBD sendiri sehingga membutuhkan Kerjasama dengan instansi lain yang telah memiliki kompetensi. Salah satu contoh peningkatan kapasitas pegawai BPBD yaitu melakukan peningkatan kapasitas TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Singkawang. Peran BPBD sebagai modernisator tidak hanya dilakukan pada anggota BPBD saja namun kepada masyarakat, dikarenakan masyarakat sebagai sasaran utama dari setiap kegiatan BPBD itu sendiri, selain itu peningkatan pengetahuan kebencanaan di masyarakat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bencana seperti banjir. Dengan meningkatnya pemahaman di masyarakat maka masyarakat dapat melihat isu-isu yang ada sebelum bencana terjadi kemudian dapat mengambil tindakan sesuai dengan pemahaman yang telah didapat sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu “dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir kita melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat bagaimana memitigasi banjir maupun bagaimana cara mengevakuasikan diri ke tempat yang lebih aman, dan apa saja yang dilakukan apabila banjir terjadi” berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan



Kesiapsiagaan tersebut kegiatan sosialisasi merupakan salah satu kegiatan di BPBD Kota Singkawang yang telah intensif di lakukan beberapa tahun belakangan, Untuk merubah pemahaman masyarakat dari tanggap darurat ke pengurangan resiko bencana. Perkembangan ilmu pengetahuan mendorong masyarakat berpandangan bahwa bencana timbul di karenakan proses geofisik, geologi, dan hidrometeorologi yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Berdasarkan pandangan tersebut BPBD Kota Singkawang mengadakan sosialisasi kebencanaan agar masyarakat lebih peduli kepada lingkungannya, salah satunya dengan sosialisasi melarang mendirikan pemukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan tidak membuang sampah rumah tangga ke drainase yang dapat membuat aliran drainase menjadi tidak stabil.

Terkait dengan peran BPBD sebagai modernisator dengan peningkatan pengetahuan bencana banjir di masyarakat, seperti hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang terdampak banjir yaitu “peningkatan pengetahuan bencana banjir untuk kami sebagai masyarakat adalah kegiatan yang positif yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang kami lebih paham bagaimana cara mengurangi dampak dari bencana dan juga meningkatkan kesadaran kami untuk tidak membuang sampah sembarangan ke drainase” hasil wawancara dengan masyarakat di daerah rawan banjir tersebut menyimpulkan bahwa himbauan dan sosialisasi yang di lakukan oleh BPBD mendapat respon baik oleh masyarakat. Masyarakat yang menjadi narasumber yaitu masyarakat di daerah Kelurahan Condong, Kelurahan Condong merupakan daerah yang sangat rawan banjir pada musim penghujan ditambah lagi dengan topografi tanah yang termasuk dataran rendah, Namun pada saat ini masyarakat telah memahami bagaimana cara memitigasi bencana banjir dan pembuangan sampah sembarangan sudah mulai berkurang karena kesadaran masyarakat yang mulai meningkat.

### **3.4. Peran Sebagai Pelopor**

Sebagai organisasi pemerintah yang di bentuk untuk menanggulangi bencana khususnya pada tahap pra bencana yaitu mitigasi bencana yang menjadikan BPBD Kota Singkawang harus dapat mengambil tindakan dan upaya dalam meminimalisir terjadinya bencana banjir. Penanggulangan bencana banjir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks yang tidak hanya bertumpu pada satu organisasi yaitu BPBD saja namun membutuhkan semua instansi yang memiliki tanggung jawab yang sama, Maka untuk mengefektifkan kinerja dan koordinasi antar stake holder tersebut BPBD berperan sebagai koordinator dan fasilitator yang aktif mengsucceskan program-program penanggulangan bencana banjir di Kota Singkawang dan termasuk upaya pencegahan banjir, evakuasi dan perlindungan pengungsi, upaya rekonstruksi pasca bencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang yaitu “bencana banjir merupakan tanggung jawab kita bersama bukan hanya tanggung jawab BPBD semata namun semua stakeholder terutama stake holder di lingkungan pemerintah kota Singkawang sendiri, karena demikian maka koordinasi sangat diperlukan agar semua tindakan kami dapat terarah dan efektif. Kita BPBD Kota Singkawang sebagai koordinator sekaligus pelopor dalam penanggulangan bencana. Koordinasi ini penting dilakukan untuk menyelaraskan pelaksanaan penanggulangan bencana dan langkah yang kami ambil dalam mengkoordinasikan antar badan yaitu melalui penyusunan kajian kebencanaan.” pendapat Kepala Pelaksana BPBD tersebut dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Singkawang bertindak sebagai pelopor dalam penanggulangan bencana, hal ini dikarenakan BPBD Kota Singkawang sebagai koordinator sekaligus pelopor dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Langkah-langkah yang dilakukan BPBD Kota Singkawang sebagai kepeloporan dalam penanggulangan bencana banjir yaitu penyusunan kajian resiko bencana, kajian resiko bencana dibuat bersama-sama dengan semua stakeholder terkait dengan memadukan data Lembaga masing-masing. Dalam kajian resiko bencana

tersebut memuat kondisi geografi, demografis, indeks resiko bencana dan memperjelas secara mendetail peran masing-masing stakeholder dalam penanggulangan banjir di Kota Singkawang. Hasil kajian resiko bencana juga dapat menjadi acuan Lembaga terkait dalam mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir.

Melalui observasi yang dilakukan peneliti dengan adanya kajian resiko bencana sebagai acuan Lembaga-lembaga terkait penulis mengamati bahwa BPBD Kota Singkawang dan stake Holder terkait menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing khususnya pada saat di lapangan.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang yaitu “Pada tahap pra bencana kita melakukan koordinasi dengan kelurahan melalui program kami yaitu Kelurahan Tangguh bencana dimana kapasitas masyarakat dan resiko bencana dapat di petakan. Kemudian kita BPBD Kota Singkawang harus lebih aktif dalam perencanaan dan pengurangan dampak dari bencana banjir ini dengan melakukan mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang” melalui wawancara di atas dapat disimpulkan BPBD memiliki keseriusan sebagai pelopor dalam menghadapi bencana banjir dimana BPBD berusaha menjadi Lembaga pemerintah yang lebih aktif dalam melakukan pengurangan dampak bencana banjir di Kota Singkawang dengan melakukan mitigasi bencana. Meskipun demikian pada saat waktu yang krusial seperti pada saat tanggap darurat tidak dapat di pungkiri BPBD membutuhkan Lembaga lain seperti dinas Kesehatan dan TNI-POLRI untuk mengevakuasi masyarakat dan meminimalisir korban. Pada saat pra bencana kebijakan BPBD sebagai kepeloporan dalam penanggulangan banjir yaitu dengan membentuk kelurahan Tangguh bencana.

Indikator berhasilnya BPBD dalam perannya sebagai pelopor penanggulangan bencana banjir dapat di ukur dengan respon masyarakat menilai kinerja BPBD melalui kebijakan dan aturan yang telah di buat sebelumnya. Untuk lebih memperjelas hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang terdampak banjir, beliau mengungkapkan bahwa “biasanya ketika terjadi banjir tahunan, memang disini pasti selalu banjir setiap tahunnya, jadi sebelum banjir kami udah di beri peringatan seperti mempersiapkan diri menghadapi banjir. Saat banjir, kami langsung disuruh ke tempat pengungsian. Kamu pasti tahu kalo disini banjirnya bagaimana, tidak mungkin kami tinggal di rumah karena banjirnya bisa sampai ke paha orang dewasa. Jadi pemerintah sudah menyiapkan tempat untuk mengungsi dan di tempat itu juga kami di kasi sembako seperti makanan, mie instan dan kebutuhan lainnya, baju juga dikasi kemudian karpet untuk tidur sementara di tempat pengungsian. Untuk kinerja pemerintah sudah mantap, saya berharap tetap dipertahankan atau ditingkatkan lagi agar tidak ada korban jiwa atau kerugian yang besar” penanganan bencana banjir sangatlah penting untuk itu organisasi yang harus menjadi pelopor adalah BPBD. Kepeloporan BPBD dalamantisipasi banjir dilakukan melalui langkah-langkah normalisasi sungai pada daerah yang rawan banjir agar sungai-sungai yang dianggap menjadi penyebab banjir dapat menampung debit air yang banyak. Berdasarkan keterangan salah satu anggota masyarakat tersebut BPBD telah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dari hal tersebut maka dapat disimpulkan BPBD telah melaksanakan perannya sebagai pelopor dalam mitigasi bencana banjir dimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya telah dirasakan oleh masyarakat.

### **3.5. Peran Sebagai Pelaksana Sendiri**

Kegiatan penanggulangan bencana banjir pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berbagai penyebab penanggulangan bencana yaitu dilakukan BPBD sebagai pelaksana sendiri karena memang tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Singkawang adalah

memberikan rasa aman dan tenang kepada masyarakat karena memang kegiatan penanggulangan bencana ini adalah termasuk kedalam urusan pemerintahan yaitu pada urusan pemerintahan wajib pada pelayanan dasar. Sebagai lembaga pemerintah BPBD Kota Singkawang harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur tentang tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Singkawang.

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sarana dan prasarana sangat penting bagi suatu instansi. Sarana dan prasarana berfungsi untuk menciptakan kenyamanan, kepuasan dan kecepatan dalam proses kerja. Sarana dan prasarana juga berfungsi untuk meningkatkan produktivitas, mempermudah proses kerja, dan hasilnya pun lebih berkualitas. Maka dari itu dibutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses penanggulangan bencana.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan beliau mengungkapkan bahwa “alat pendukung penanggulangan bencana di BPBD Kota Singkawang ini masih kurang dengan melihat potensi bencana di Singkawang yang tinggi dan kita sekarang sedang dalam kondisi cuaca hujan yang tinggi membuat kita siaga akan terjadinya banjir. Kekurangan ini dilihat dari kerusakan pada mobil rescue kami yang sering mogok dan masih belum adanya mobil serba guna serta perahu karet yang rusak hal ini membuat kami kesulitan dalam melakukan penanggulangan bencana” dalam penanggulangan bencana selain kelengkapan sarana prasarana salah satu faktor penting lain yaitu jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir di Kota Singkawang. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Singkawang sebagai berikut “sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang penting dalam penanggulangan bencana dan tidak dapat tergantikan misalkan saja dalam proses evakuasi jelas SDM sangat dibutuhkan baik mengoprasionalkan sarana prasarana maupun memberi pertolongan ke masyarakat terdampak. Jika mengacu kebutuhan BPBD saat mitigasi bencana banjir BPBD Kota Singkawang sudah mencukupi dalam SDMnya namun pada saat tanggap darurat bencana banjir SDM kami masih terbilang sangat kurang karena banjir mengenang di beberapa titik kami harus memilih prioritas wilayah yang terparah untuk melakukan kebencanaan” berdasarkan keterangan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Singkawang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa BPBD Kota Singkawang kekurangan sumber daya manusia terutama pada saat tanggap darurat, BPBD harus menetapkan prioritas wilayah terparah untuk melakukan proses evakuasi sementara pada saat tanggap darurat tersebut merupakan fase yang paling membutuhkan tindakan cepat BPBD untuk mencegah timbulnya korban jiwa. Untuk mengatasi masalah kekurangan sumber daya manusia BPBD melakukan koordinasi dengan instansi lainnya. Kebutuhan akan sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang harus ditemukan solusinya karena bencana banjir merupakan bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba untuk itu dengan rekrutmen sumber daya manusia maka sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan BPBD dalam penanggulangan banjir. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana banjir selain sarana prasarana adalah anggaran. Anggaran bagi organisasi pemerintah seperti BPBD merupakan unsur yang sangat penting. Pentingnya anggaran bagi penanggulangan banjir karena beberapa alasan yaitu anggaran menjadi alat BPBD untuk melakukan pembangunan fasilitas penanggulangan banjir dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang harus memiliki anggaran yang berfungsi untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana. Seperti hasil wawancara dengan Kepala Sekretariat BPBD Kota Singkawang yaitu “Anggaran merupakan hal yang sangat vital. Tanpa anggaran, suatu instansi tidak akan bisa membuat program-program sesuai tupoksinya. Selain untuk penunjang membuat program, anggaran pun berfungsi untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung” dan dilanjutkan dengan hasil

wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yaitu “Anggaran untuk mitigasi bencana sendiri pastinya ada, seperti pembuatan spanduk, banner, plifpet dan hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Kemudian anggaran ini bisa juga digunakan untuk peningkatan kapasitas TRC yaitu Tim Reaksi Cepat agar dalam penanggulangan bencana nantinya dapat terselesaikan dengan cepat, tepat dan terarah” dalam melaksanakan peranannya, suatu instansi memerlukan dana/anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Alokasi anggaran tersebut mengacu pada perencanaan program yang telah dibentuk oleh instansi yang bersangkutan. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang harus bisa merencanakan program sesuai visi misi organisasi, tupoksi organisasi, sehingga perencanaan anggaran, pengajuan anggaran, persetujuan anggaran, penggunaan anggaran hingga pertanggungjawaban anggaran bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang memberikan banyak dampak positif kepada masyarakat dalam rangka pengurangan dampak dari bencana banjir baik dampak material hingga korban jiwa. Penulis menemukan temuan penting yakni faktor penghambat dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang yaitu:

a. Sumber Daya Manusia yang Kurang Memadai

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian di lapangan oleh penulis, dapat diketahui bahwa untuk jumlah personil pegawai yang dimiliki BPBD Kota Singkawang saat ini sudah mencukupi untuk kegiatan mitigasi bencana dilapangan. Namun saat tanggap darurat BPBD Kota Singkawang dinilai masih kekurangan dalam pengalokasian jumlah pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan beliau mengungkapkan bahwa “salah satu pegawai disini yang sudah lumayan lama bekerja disini tetapi tidak bisa menggunakan komputer jadi saya susah punya rekan seperti itu. Punya pegawai dengan kualitas rendah disuruh jadi operator pun tidak bisa, inilah yang menjadi kendalanya” selain itu rata-rata pegawai BPBD Kota Singkawang hanya memiliki keahlian yang sangat minim, hal ini disebabkan dari jenjang lulusan yang kebanyakan merupakan tamatan SLTP dan SLTA dimana keahlian mereka hanya terbatas. Untuk kompetensi lainnya yang menjadi sorotan adalah ketersediaan pegawai yang mengerti teknologi dan pengoperasian sarana kebencanaan maupun pemetaan dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan.

b. Perampingan Birokrasi Struktur Organisasi BPBD Kota Singkawang

Perampingan birokrasi ini dilakukan sesuai dengan perintah presiden Republik Indonesia yaitu untuk penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah, termasuk penghematan anggaran. Menurut Presiden, semakin ramping sebuah organisasi maka semakin bisa dikendalikan anggarannya. Akan tetapi, perampingan ini menjadi kendala bagi BPBD Kota Singkawang. Dahulu BPBD Kota Singkawang memiliki 3 (tiga) Kasi yaitu kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan dan Logistik, Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Karena struktur organisasi BPBD Kota Singkawang dilakukan perampingan maka sekarang BPBD Kota Singkawang memiliki 2 (dua) Kasi yaitu Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Kasi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada, beliau mengungkapkan bahwa “kemudian hambatannya itu SOTKnya, dulu ada 3 kasi yaitu kasi

pengecehan tupoksinya sampai keadaan sebelum terjadinya bencana, sesudah kejadian bencana itu sudah bukan lagi tupoksi pencegahan dan mitigasi, tetapi itu sudah tupoksinya logistic dan kedaruratan, saat keadaan darurat itu tugasnya kasi logistic dan kedaruratan dan pasca bencananya itu adalah tupoksi kasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Keadaan saat ini kita hanya memiliki dua kasi yaitu Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan kasi Kedaruratan, Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Jadi menurut saya itu kurang nah ketika terjadinya bencana yang ngurus kedarutatannya, logistiknya, rehabilitasinya itu di bebaskan kepada satu bagian. Saya juga merangkap jabatan pencegahan juga saya yang bertanggungjawab dan kedaruratan pun juga saya yang bertanggungjawab jadi ini yang membuat bpbd menjadi rumit” keadaan menjadi semakin rumit karena setiap bagian bertanggungjawab atas bagian yang sebelumnya bukan tanggungjawabnya.

c. Sarana dan Prasarana Yang Masih Kurang

Sumber daya lainnya yang tidak kalah penting adalah sarana dan prasarana. Seperti yang dikatakan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beliau mengungkapkan bahwa “untuk sarana dan prasarana yang masih kurang seperti mobil serbaguna tidak ada, dan mobil rescue BPBD sekarang sudah mogok tidak bisa lagi digunakan. Gudang juga tidak terawat dikarenakan pegawai yang dikhususkan untuk pembersihan gudang dan alat- alat penanggulangan bencana masih belum ada. Seharusnya pegawai yang dikhususkan untuk pembersihan gudang dan alat-alat penanggulangan bencana harus ada agar keadaan inventaris negara bisa terawat. Ini lah yang menjadi permasalahan kita” kemungkinan mogoknya kendaraan dikarenakan pegawai yang dikhususkan untuk pembersihan gudang dan alat-alat penanggulangan bencana masih belum ada.

Kemudian upaya yang dilakukan BPBD Kota Singkawang yaitu dengan melakukan:

a. Peningkatan Sumber Daya Manusia

BPBD selaku badan yang menangani penanggulangan bencana pada tingkatan daerah menyadari bahwa kualitas pegawainya kurang memenuhi standar kebutuhan yang diperlukan dalam memahami dan berpengetahuan akan kebencanaan. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, BPBD Kota Singkawang melakukan peningkatan kapasitas TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk peningkatan Sumber Daya Manusia di BPBD Kota Singkawang. Selain itu bentuk upaya peningkatan kualitas kepada setiap pegawai BPBD yang masih rendah keahlian, maka BPBD melakukan fasilitator dengan memberikan bekal pelatihan. Pembekalan fasilitator pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian, kepahaman, kemampuan dan kompetensi para pegawai.

b. Melakukan Kesiagaan Bencana Banjir di Kota Singkawang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang melakukan upaya kesiagaan bencana banjir di Kota Singkawang yaitu dengan cara monitoring, sosialisasi dan membuat peta rawan banjir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, beliau mengungkapkan bahwa “jadi ditingkat mitigasi dan kedaruratan itu ada siaga kebakaran hutan dan lahan kemudian ada pencegahan kesiagaan bencana banjir jadi kegiatannya dari kegiatan

monitoring, sosialisasi, membuat peta rawan banjir. Kemudian untuk sesudah bencana jadi itu sudah tupoksinya kedaruratan dan kami dapat bantuan juga dari tagana” untuk mengatasi faktor penghambatnya BPBD Kota Singkawang melakukan upaya semaksimal mungkin demi tercapainya mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang untuk mengurangi dampak kerugian dan korban jiwa.

c. Melakukan Koordinasi Horizontal Secara Berkala

Pelaksanaan koordinasi horizontal khususnya instansi yang menangani langsung tentang kebencanaan yaitu dengan TNI/POLRI melalui rapat untuk menyamaratakan tata cara penanggulangan bencana banjir di Kota Singkawang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Singkawang, beliau mengungkapkan bahwa “Jadi koordinasi ini kami ada rapatnya, jadi memang dikhususkan pembuatan rapat untuk menyamaratakan penanggulangan bencana. Jadi biasanya pelaksanaan rapat itu minimal 4 atau 5 kali dalam 2 atau 3 bulan sekali” pelaksanaan rapat ini berfungsi untuk menyelaraskan kegiatan penanggulangan bencana. TNI/POLRI membantu BPBD dalam Penanggulangan bencana karena dilihat dari pegawai BPBD yang sedikit, dibutuhkan bantuan dari instansi lain agar kegiatan tanggap darurat terselenggara dengan baik. BPBD berperan sebagai koordinator yang mengarahkan proses penanggulangan bencana.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa peran dari BPBD Kota Singkawang dalam mitigasi bencana banjir telah berjalan dengan baik dikarenakan peran BPBD sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri sudah dilaksanakan dengan baik serta masyarakat yang terdampak banjir memberikan respon yang baik kepada BPBD Kota Singkawang. Selain itu, program yang sudah BPBD terapkan untuk menambah kapasitas Pegawai BPBD dan masyarakat yaitu dengan cara peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat dan program Kelurahan Tahan Bencana agar kerugian material dan jiwa dapat berkurang. Terdapat beberapa faktor yang menghambat, yaitu sumber daya manusia yang kurang memadai, perampangan birokrasi struktur organisasi BPBD Kota Singkawang, dan sarana dan prasarana yang masih kurang. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang untuk mengatasi factor penghambat yaitu dengan cara peningkatan sumber daya manusia, melakukan kesiagaan bencana banjir di Kota Singkawang, dan melakukan koordinasi horizontal secara berkala. Adapun saran yang penulis berikan kepada BPBD Kota Singkawang sesuai dengan observasi, dokumentasi dan wawancara yaitu:

1. Meningkatkan program yang telah dilaksanakan serta mengupayakan program yang belum terlaksana.  
Apabila Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang ingin untuk dapat berperan secara maksimal dalam hal penanganan terhadap penanggulangan bencana banjir, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang harus mampu untuk memenuhi dan melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan penanggulangan bencana banjir di Kota Singkawang.
2. BPBD Kota Singkawang diharapkan dapat membuat terobosan atau inovasi yang lebih menarik dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di masa mendatang. Ini akan membantu masyarakat dari segala usia memahami informasi tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Melalui pengelolaan website juga diharapkan e-government dapat segera diterapkan di BPBD

Kota Singkawang sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi, seperti informasi tentang bencana, kegiatan, dan seberapa baik BPBD Kota Singkawang. sedang mengerjakan. Misalnya, di website BPBD Kota Singkawang bisa dipasang video sosialisasi kebencanaan.

3. Perlu adanya peningkatan pengetahuan dasar masyarakat tentang pengurangan risiko bencana sehingga mereka dapat berkontribusi secara nyata dalam penanggulangan bencana banjir, terutama di daerah mereka sendiri. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan:
  - a. Key person/relawan yang membantu dalam pengembangan penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah mereka yang melaksanakan penanggulangan bencana banjir di wilayahnya dengan cara terkoordinasi dan berhubungan sehingga kelompok atau forum dapat secara aktif bekerja sama.
  - b. Relawan dalam penanggulangan bencana banjir membangun jaringan antar wilayah, komunitas, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana banjir masyarakat dan mengembangkan strategi mitigasi.
4. Sangat penting untuk membangun kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pengurangan risiko bencana agar dapat beroperasi secara efisien, berkelanjutan, dan dengan kesadaran dan keadilan lingkungan. Di antaranya tindakan yang harus dilakukan adalah:
  - a. Kolaborasi multi-stakeholder dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat (masyarakat, kelompok, swasta, dan pemerintah).
  - c. Tindakan pencegahan untuk mengurangi dampak bencana.
  - d. Bimbingan dan pengembangan kapasitas yang disediakan pemerintah untuk organisasi dan masyarakat yang terlibat dalam manajemen bencana berbasis masyarakat.
  - e. Pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan tata ruang dan keadaan lingkungan.
  - f. Penanaman pohon untuk penghijauan dan menambah cadangan air bawah tanah.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan di Kota Singkawang saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana banjir di Kota Singkawang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kota Singkawang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal., 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo.
- Ambar dkk., 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto., 2009. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Gulo, W., 2000. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Grasindo.
- John, C. W., 2013. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Kumar, R., 2010. *Research Methodology*. London: Sage Publication.

Moleong, L. J., 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nazir, M., 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nazir, M., 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugrahani, F., 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Rahayu., 2009. *Banjir dan Upaya Penanggulangannya*. Bandung: Pusat Mitigasi Bencana.

Siagian, S. (2012). *Administrasi Pembangunan : Konsep, dimensi, dan strateginya* (Vol. 8). PT Bumi Aksara.

Sugiyono., 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Beong dkk. 2018. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Samarinda, *eJournal Ilmu Pemerintahan* Vol. 6 (4) 1775-1788.

Riantika, H. 2021. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Barus, P. 2013. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Medan. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2013).

Ahdi, D., 2015. *Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen Risiko*. Reformasi, Vol. 5 (1).

Sebastian, L., 2008. Pendekatan Pencegahan dan Penanggulangan Banjir. *Jurnal Dinamika Teknik Sipil*, 8.

www.undrr.org. (2009). 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction. Diakses September 7, 2021, from www.undrr.org website: <https://www.undrr.org/publication/2009-unisdr-terminology-disaster-risk-reduction>.

www.bnpb.go.id. (2021). Bencana Banjir Akhir Pekan Minggu Pertama Februari. Diakses September 10, 2021 dari www.bnpb.go.id website: <https://bnpb.go.id/berita/bencana-banjir-akhir-pekan-minggu-pertama-februari>.

www.kompas.com. (2011). Satu tewas akibat banjir Singkawang. Diakses September 13, 2021 dari www.kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2011/01/13/18584269/satu-tewas-akibat-banjir-singkawang>.